



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Ir. M. YUSRIAL MAHYUDDIN, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ISDIANTO, S.Sos., M.M**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2021

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M



Ir. M. YUSRIAL MAHYUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630316 199402 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih | a. Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman b. Cakupan pelayanan Sanitasi : - Air Limbah - Persampahan - Drainase | 100 % 100 % 66 % 52,24 % |
| 2 | Meningkatnya dukungan kota hijau dengan penataan bangunan dan lingkungan, pembangunan inovasi teknologi terapan, dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan permukiman /perumahan di perkotaan | Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun | 25% |
| 3 | Berkurangnya luas kawasan kumuh di wilayah perkotaan | Luas kawasan kumuh (Σ Ha) | 255 Ha |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|---------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 14.125.269.132 | APBD |
| 2. Program Pengembangan Perumahan | Rp. 1.921.060.900 | APBD |
| 3. Program Kawasan Permukiman | Rp. 91.995.300 | APBD |
| 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Rp. 197.569.406.460 | APBD |

Tanjungpinang, Januari 2021

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**



H. ISDIANTO, S.Sos., M.M

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Ir. M. YUSRIAL MAHYUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630316 199402 1 002